

Arah Pembangunan Bidang Aparatur Negara dalam RPJMN 2020-2024 dan Rancangan Awal RKP 2022

Sandjaja Sarwohadi
Fungsional Perencana Madya

**Direktorat Aparatur Negara
Kementerian PPN/Bappenas**

Disampaikan pada :
Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Semarang, Maret 2021

Kerangka Paparan

1 HIGHLIGHT RPJMN 2020-2024

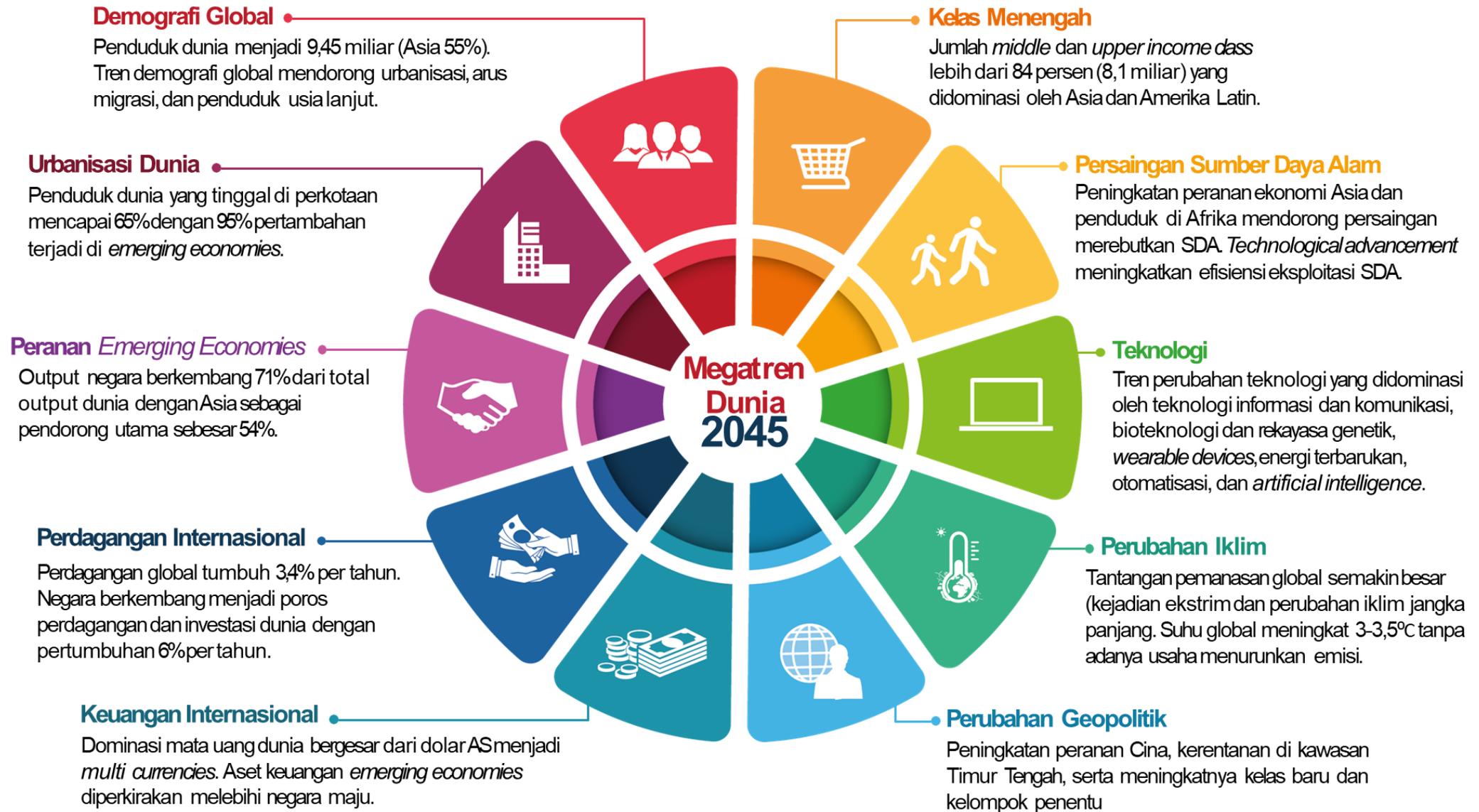
**2 PANDEMI COVID-19 DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
DALAM RKP 2022**

**3 PEMBANGUNAN APARATUR NEGARA DALAM
MENGUATKAN KAPASITAS NEGARA**

01

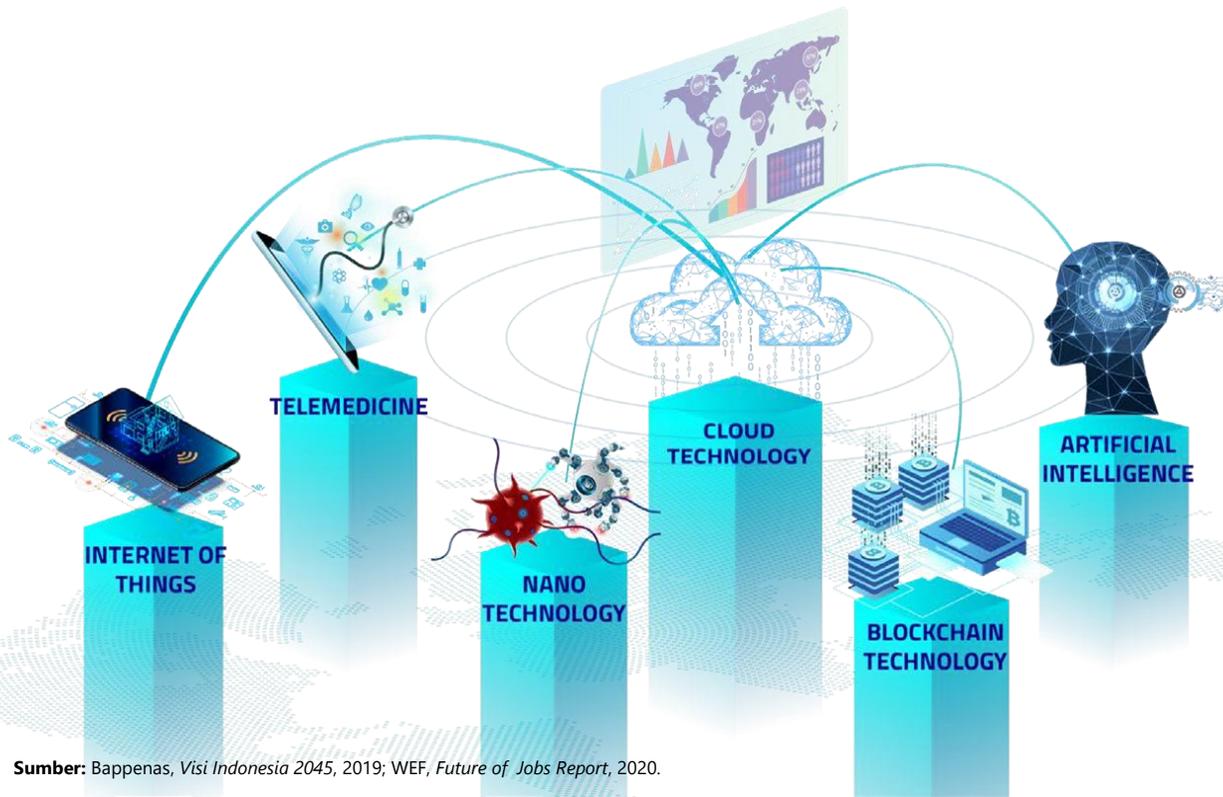
Highlight RPJMN 2020-2024

Sampai dengan tahun 2045, Dunia menghadapi 10 kecenderungan besar (*global megatrend*):



Tren Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tren teknologi ke depan antara lain (i) **teknologi digital** (internet seluler, otomatisasi, komputasi awan); (ii) **teknologi yang mengurangi keterbatasan fisik dan jarak** (IoT, transportasi dan distribusi, 3D-printing, teknologi nano); (iii) **teknologi energi** (terbarukan, surya, angin, nuklir, panas bumi), dan (iv) **teknologi kesehatan** (genetika, pengobatan dan pemulihan, pelayanan kesehatan).



Teknologi Informasi dan Komunikasi



Tenaga Medis



Industri Kreatif



People and Culture



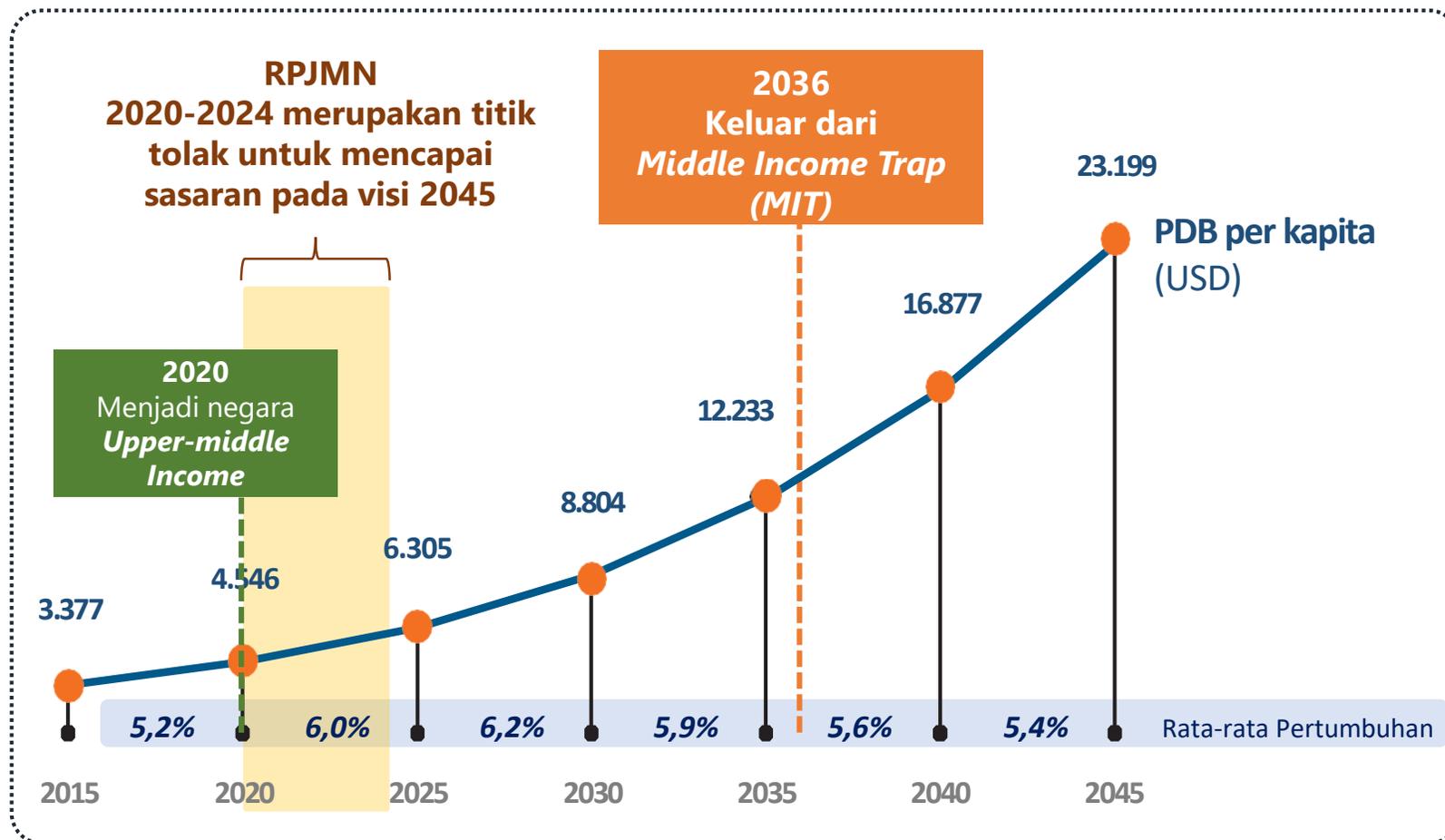
Tenaga Teknik

Kemajuan teknologi mendorong efisiensi, kesempatan baru, dan berdampak pada **kebutuhan tenaga kerja.**

Visi Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Maju

TRANSFORMASI EKONOMI

harus dimulai pada tahun 2020-2024 untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju



Rata-rata pertumbuhan
2015-2045:

PDB Riil

5,7%

PDB Riil/Kapita

5,0%

Tahun 2045:

Negara Maju dan
PDB Terbesar

Ke-5
(USD 7,4 triliun)

Peranan Ekonomi
KTI Menjadi:

25%

Dasar-dasar Kebijakan RPJMN IV (2020-2024)

Sasaran RPJMN IV (2020-2024):

Percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya **struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif** di berbagai wilayah yang didukung oleh **SDM berkualitas dan berdaya saing**



"Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai 7 triliun dollar AS dan Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen"

Pidato Pelantikan Presiden-Wakil Presiden RI 2019-2024, 20 Oktober 2019

MENERUSKAN JALAN PERUBAHAN UNTUK
INDONESIA MAJU:

BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

VISI MISI

Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin



1 | Pembangunan SDM

2 | Pembangunan Infrastruktur

3 | Penyederhanaan Regulasi

4 | Penyederhanaan Birokrasi

5 | Transformasi Ekonomi

Sektor Prioritas Pembangunan Nasional

dalam Arahannya Prioritas Presiden dan RPJMN 2020-2024

Indonesia
2045

Berdaulat, Maju,
Adil, dan Makmur

*Pencapaian Visi 2045
melalui transformasi
ekonomi yang
didukung oleh
industrialisasi dengan
memanfaatkan sumber
daya manusia,
infrastruktur,
penyederhanaan
regulasi dan birokrasi*

1 | Pembangunan SDM

- Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- IPTEK dan Inovasi
- Pendidikan Tinggi
- Prestasi Olahraga

2 | Pembangunan Infrastruktur

- Infrastruktur Pelayanan Dasar
- Infrastruktur Ekonomi
- Infrastruktur Perkotaan
- Energi dan Ketenagalistrikan
- TIK untuk Transformasi Digital

3 | Penyederhanaan Regulasi

- Penyederhanaan, Pencabutan, dan Penggabungan Regulasi

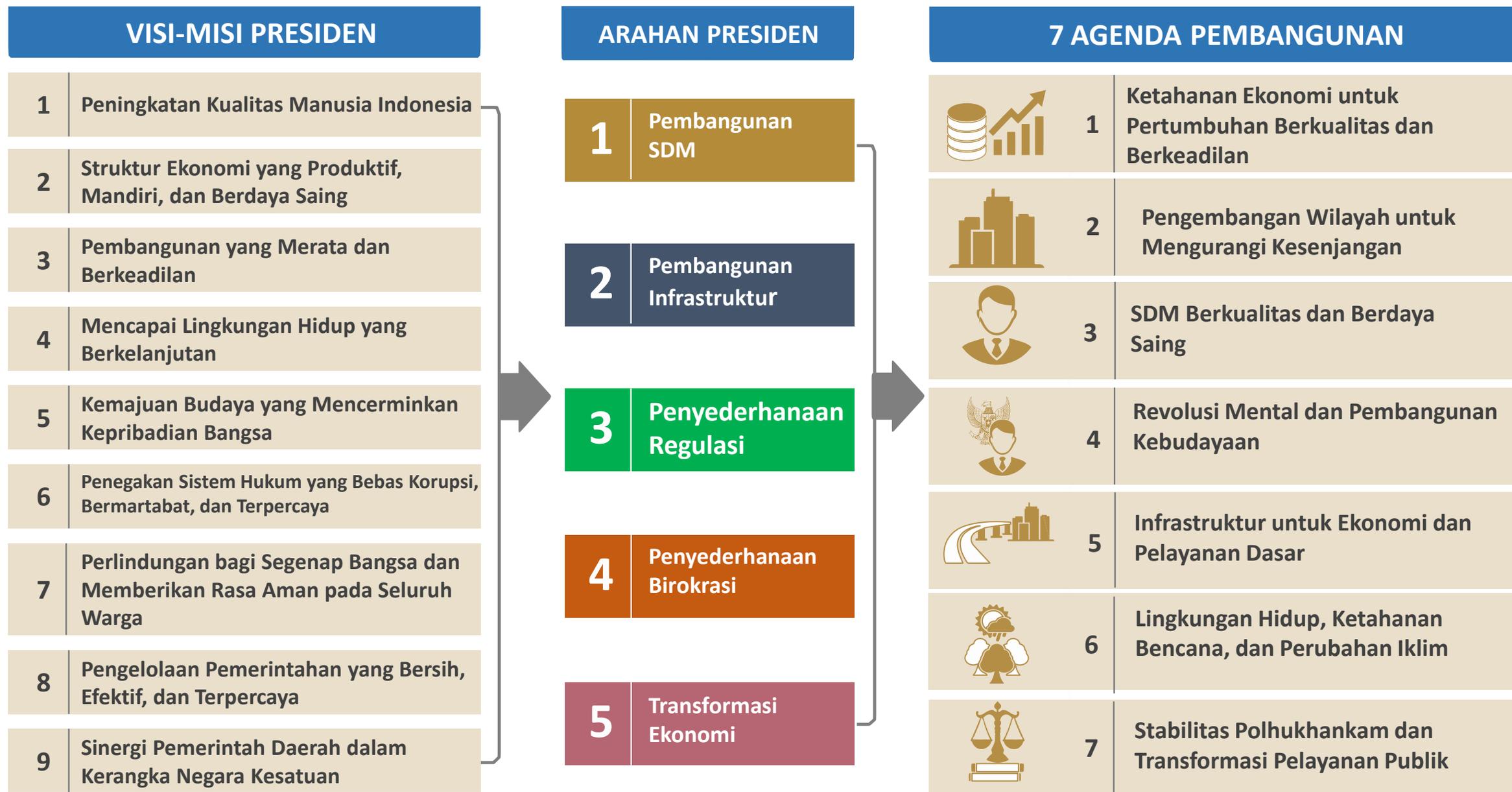
4 | Penyederhanaan Birokrasi

- Penyelenggaraan *E-Government*
- Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik

5 | Transformasi Ekonomi

- Industrialisasi Berbasis SDA dan Rantai Produksi Global
- Penguatan Ekraf dan Ekonomi Digital
- Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan

Visi-Misi dan Arah-an Utama Presiden-Wakil Presiden diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024



Kerangka Pikir 7 Agenda Pembangunan

Didukung oleh:

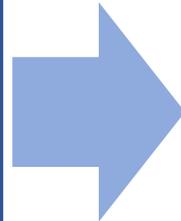
- 3 **SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**
- 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

5 **Pembangunan Infrastruktur**

Dilaksanakan melalui:



1 **Transformasi Ekonomi:**
Rata-rata Pertumbuhan 6%
per tahun



2 **Wilayah sebagai Basis
Pembangunan**



*Memperhatikan/
mempertimbangkan kondisi:*

6 **Lingkungan Hidup dan
Kerentanan Bencana**

Sebagai Prasyarat:

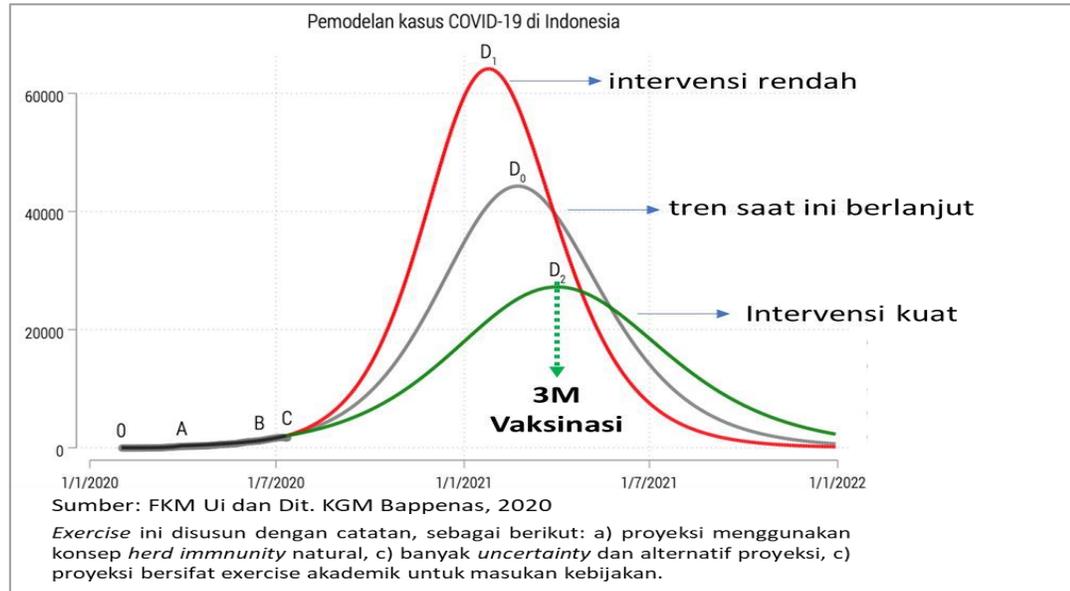


- 7 **Kondisi Polhukhankam yang Kondusif:**
- **Penyederhanaan Regulasi**
 - **Penyederhanaan Birokrasi**
 - **Stabilitas Politik dan Pertahanan Keamanan**

02

Pandemi COVID-19 dan Strategi Pembangunan dalam RKP 2022

COVID-19 Sebagai Permasalahan Nasional



Pandemi COVID-19 masih terjadi pada tahun 2021

- Kejadian COVID-19 masih mungkin terjadi di 2022

Pencapaian target kesehatan belum optimal

- Kasus baru TB masih No-3 dunia;
- Baru 300 kab/kota dengan eliminasi malaria;
- Cakupan imunisasi dasar lengkap hanya 57,9 %;
- Hanya 31,9% puskesmas yang terpenuhi 9 jenis nakes;
- Masih ada 12% puskesmas tanpa dokter;
- Hanya 12% RSUD yang memiliki 7 dokter spesialis.

Pandemi COVID-19 menunjukkan :

1

Pencegahan masih belum optimal

Screening test dan tracing & tracking masih terbatas, sistem surveilans penyakit belum terintegrasi dan belum *real-time*, kapasitas pengujian di lab lemah

2

Faskes dan farmalkes belum siap

Kekurangan APD, ruang isolasi dan alat test, ruang rawat, ruang ICU, ruang isolasi mandiri dan manajemen kasus lemah/tata laksana kasus tidak jelas

3

Kapasitas tenaga kesehatan masih terbatas

Kekurangan jumlah nakes, banyak nakes yang tertular dan meninggal akibat COVID-19

4

Manajemen respons yang tanggap belum terbangun maksimal

Pemulihan Pembangunan Nasional Pasca COVID-19

Dampak Pandemi



Pertumbuhan
Ekonomi
-0,4% - 2,3%



Tingkat Pengangguran
Terbuka
7,8-8,5%



Kunjungan Wisman
↓ 3 juta
(US\$3,6-4,0)



Tingkat Kemiskinan
9,7% - 10,2%

Kondisi ekonomi global diperkirakan mengalami **proses transformasi** di empat area:



Struktur ekonomi
dan digital



Perilaku dan pola
hidup masyarakat



Pola rantai pasok



Tatanan
internasional

TAHAP 1

**Penguatan
Fasilitas
Kesehatan**

TAHAP 2

**Melindungi
Kelompok
Masyarakat Rentan
dan Dunia Usaha**

TAHAP 3

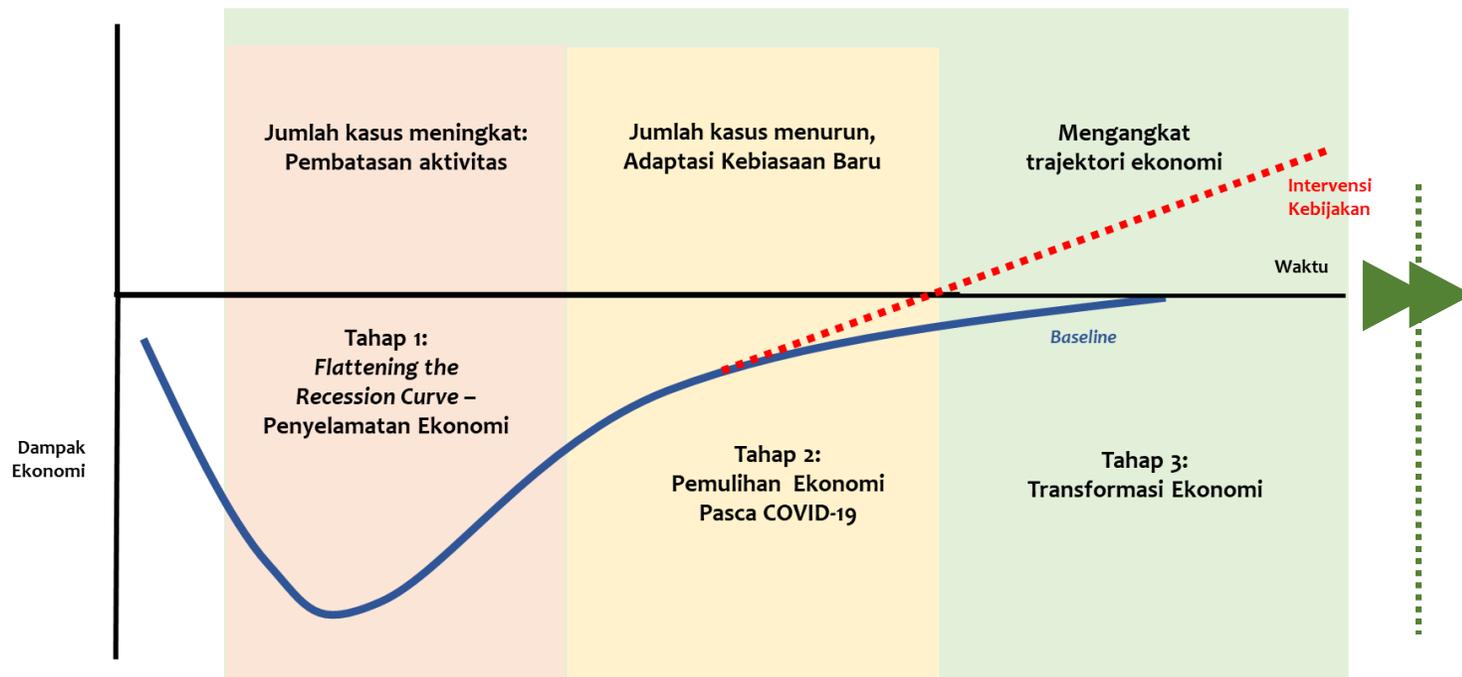
**Mengurangi
Tekanan
Sektor Keuangan**

TAHAP 4

**Program Pemulihan
Pasca COVID-19**

Sedang dan terus dilakukan oleh Pemerintah hingga penanganan wabah COVID-19 selesai

Tahap Pemulihan
Pembangunan Nasional

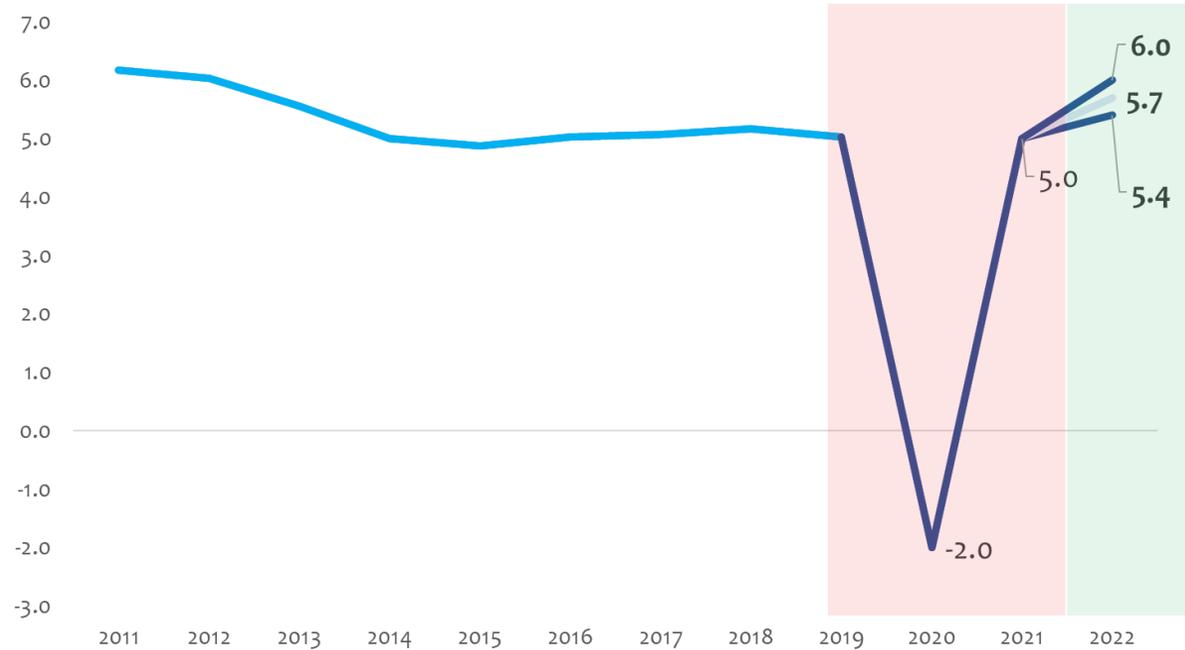


Tahapan Strategi Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19

Intervensi kebijakan yang berfokus pada sektor kesehatan, jaring pengaman sosial dan stabilitas ekonomi di masa pandemi; serta pemulihan ekonomi dan reformasi sosial di masa pasca pandemi COVID-19

Proyeksi dan Sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2020-2022 (Persen)

Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama yang relatif bebas dari tekanan COVID-19 dan menjadi tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi



Strategi Akselerasi Ekonomi Pasca COVID-19

Vaksinasi COVID-19 Menuju *Herd Immunity*

Vaksin COVID-19 yang di 'Secure' Pemerintah RI

Developer	Platform	Binding/Firm Order (juta dosis)	Opsi/Potensi (juta dosis)	ETA Indonesia
Sinovac	Inactivated Virus	125,5		Des 2020 - Jan 2022
			100	Sep 2021 – Mar 2022
AstraZeneca	Viral Vector (Non Replicating)	50	50	Q2 2021 – Q1 2022
Novavax	Protein Subunit	50	80	Jun 2021 – Mar 2022
Pfizer	RNA Based Vaccine	50	50	Q3 2021 – Q1 2022
COVAX/GAVI		54	54	Q2 2021 – Q1 2022
Jumlah		329,5	334	
Total		663,5		
Total kebutuhan vaksin untuk 181,5 juta penduduk		426,8		

1. Berdasarkan ketersediaan vaksin, maka **herd immunity tercapai dalam 15 bulan**
2. *Herd immunity* bisa dipercepat jika **ketersediaan vaksin bertambah**
3. **Aktifitas ekonomi dapat dimulai sebelum herd immunity** tercapai, yaitu ketika COVID-19 terkendali (jika kasus terus mengalami penurunan $R_t < 1$)
4. Dalam kondisi ini maka aktivitas ekonomi dan sosial dapat dimulai, dengan tetap melaksanakan **protokol kesehatan**

1. Dari 269 juta penduduk Indonesia, perlu 188 juta penduduk untuk **herd immunity** penduduk di atas 18 tahun. Dengan kriteria eksklusi: 1) komorbid, 2) eks-pasien COVID-19, dan 3) ibu hamil, maka **target vaksinasi adalah 181,5 juta penduduk**.
2. **Kebutuhan dosis** untuk vaksinasi 181,5 juta penduduk adalah **426,8 juta dosis** (ditambah 15% cadangan).

Tema, Fokus, dan Strategi Pembangunan Tahun 2022

TEMA RKP 2022

“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”

FOKUS RKP 2022



HIGHLIGHT MAJOR PROJECT

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

- MP 9 Kawasan Industri dan 31 Smelter
- MP Peningkatan Peran UMKM
- MP Energi Terbarukan
- MP *Food Estate*
- MP 10 Destinasi Wisata

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

- MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
- MP Sistem Kesehatan Nasional
- MP Reformasi Pendidikan dan Keterampilan

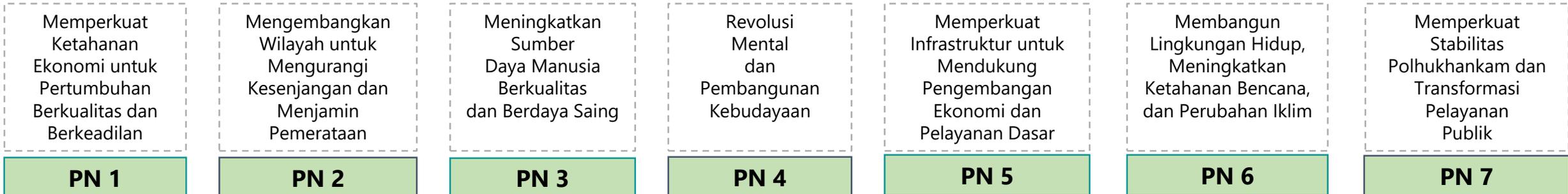
PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

- MP di Wilayah Papua
- MP Ibu Kota Negara

PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan

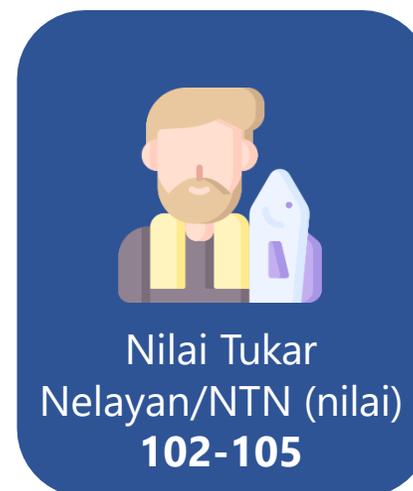
- MP Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
- MP Transformasi Digital (Infrastruktur, Pemanfaatan dan *Enabler*)

PRIORITAS NASIONAL (PN)

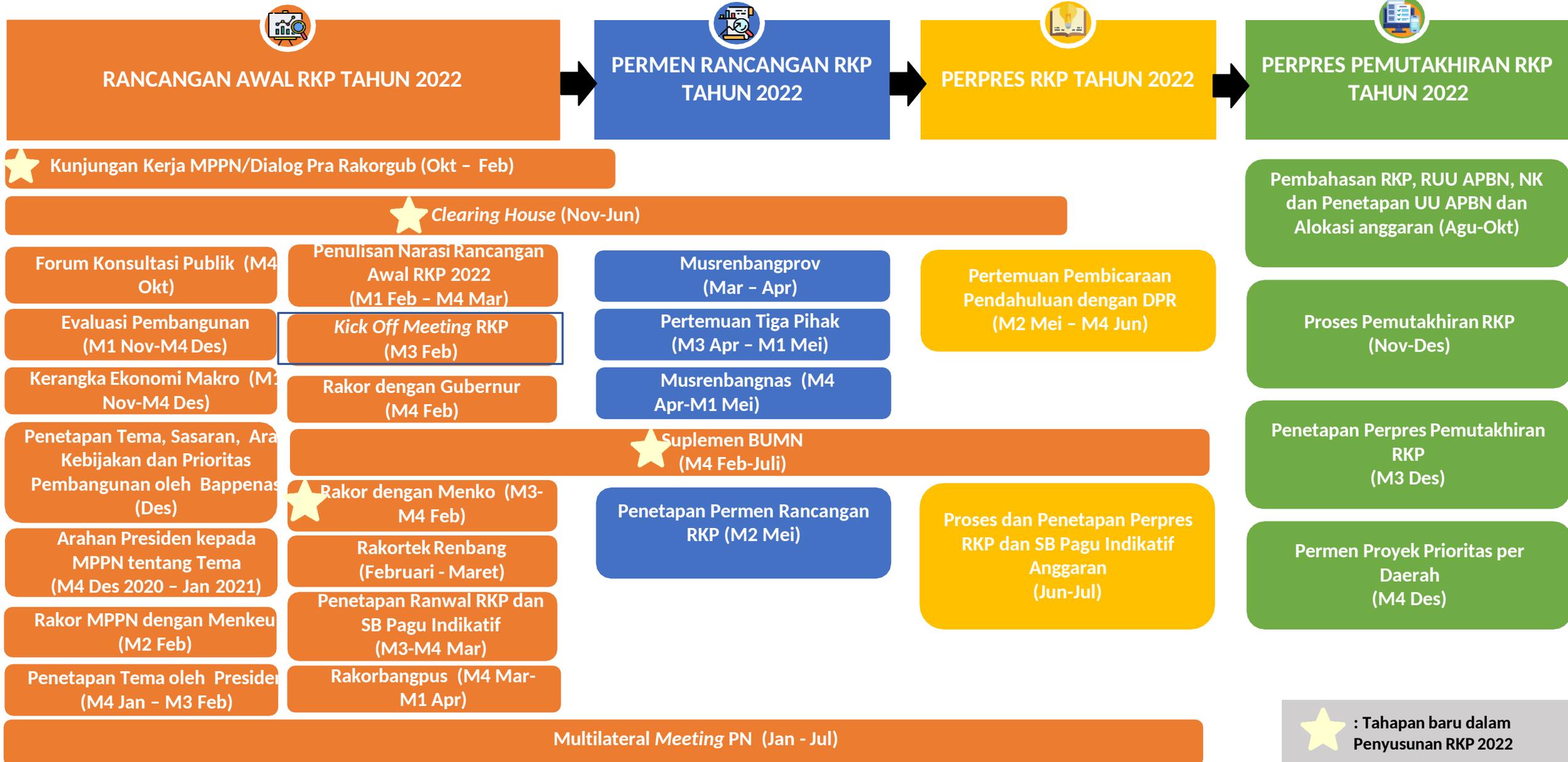


Sasaran Pembangunan RKP 2022

Sasaran Pembangunan RKP 2022 berupa Rancangan Awal



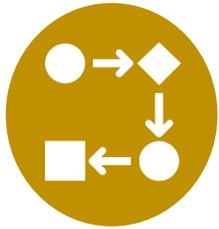
Tahapan Penyusunan RKP Tahun 2022



03

Pembangunan Aparatur Negara dalam Menguatkan Kapasitas Negara

Tantangan Pembangunan Birokrasi



Kompleksitas Permasalahan Publik

Karakter dan kompleksitas masalah publik semakin pelik



Kebijakan Berbasis Data

Data menjadi basis penting perumusan kebijakan publik



Pergeseran Budaya

Globalisasi mendorong pergeseran dan pembauran nilai serta budaya antarbangsa



Transformasi Digital

Dorongan optimalisasi TIK dan digitalisasi sektor publik



Keterbukaan Pemerintah

Menguatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pemerintah



Orientasi Kewilayahan

Fokus pada capaian pembangunan daerah

Dibutuhkan birokrasi berkarakter **masa depan**, antara lain:

Proaktif dan bekerja berbasis bukti
(*evidence-based*)

Adopter perkembangan TIK

Berfokus pada hasil dan kinerja

Berorientasi pelayanan pada masyarakat

Sumber:

diadaptasi dari: KPMG International and Mowat Centre, *Future State 2030: The global megatrends shaping governments*, 2016; OECD, *OECD Public Governance Reviews: Skills for a High Performing Civil Service*, 2017.

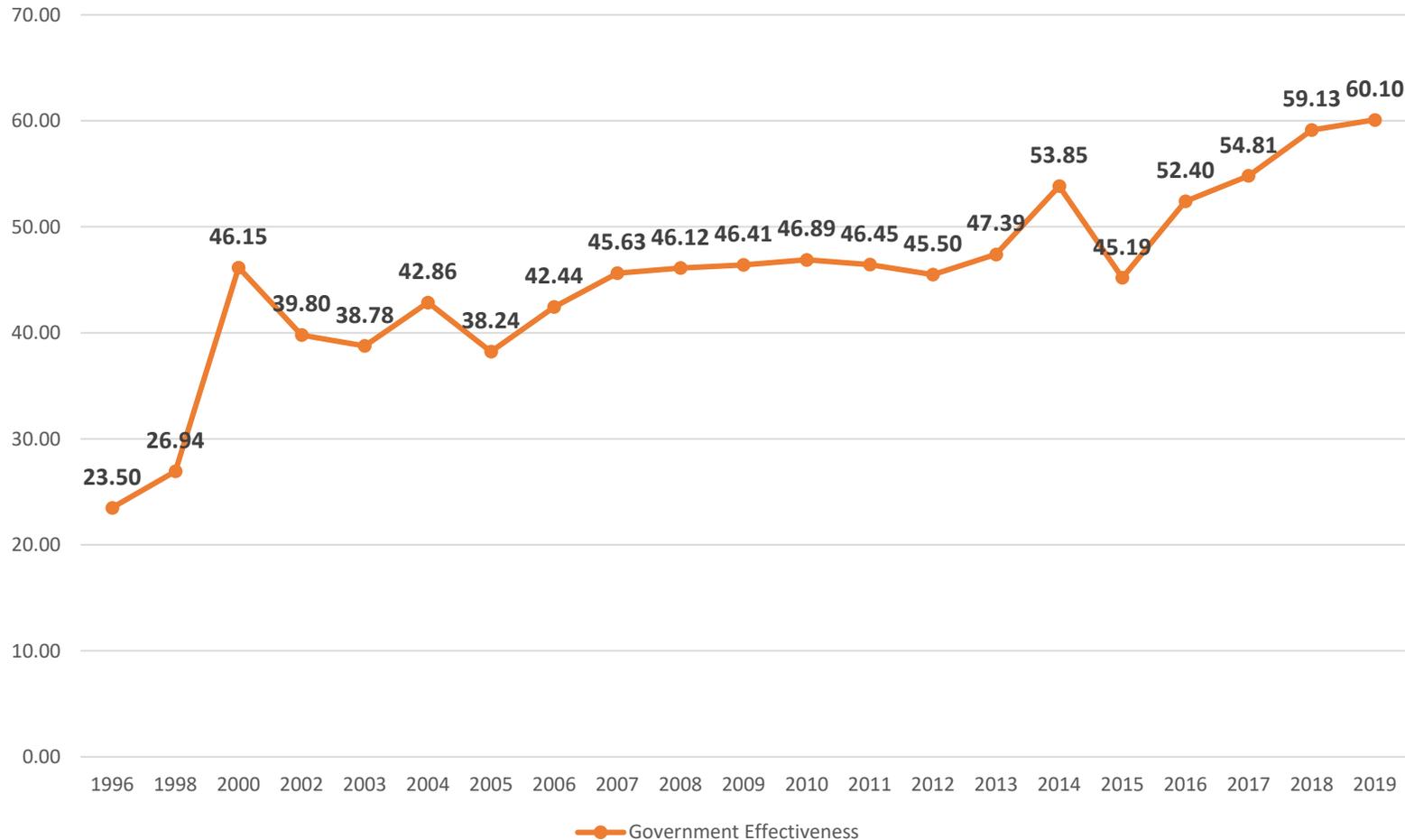
COVID-19 dan Urgensi Transformasi Tata Kelola Organisasi

	Kondisi	Kebangkitan Prioritas 1-2 tahun ke depan	Transformasi Prioritas 3-5 tahun ke depan
	<ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya talenta akibat sistem pendidikan yang usang Meningkatnya kebutuhan keterampilan digital 	Reskilling dan upskilling pada keterampilan yang makin dibutuhkan	Pembaruan kurikulum pendidikan dan penguatan keterampilan masa depan
	Belum adilnya pemberian insentif dan kesejahteraan pada pekerja	Pemberian kompensasi dan insentif berbasis kinerja	Penyesuaian regulasi ketenagakerjaan dengan kebutuhan pekerjaan masa depan
	Pengaruh perubahan demografi pada sektor kesehatan dan pendidikan	Penguatan sistem kesehatan dan pendidikan dalam menghadapi pandemi	Perluasan cakupan, akses dan inovasi kesehatan serta pendidikan
	Lemahnya check and balances dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan	Penguatan kebijakan bervisi jangka panjang dan pelayanan digital	Penerapan tata kelola kuat dan bervisi jangka panjang untuk membangun <i>trust</i> masyarakat

Indonesia dalam *Government Effectiveness Index*

Tren Meningkat, Namun Tetap Diperlukan Upaya Perbaikan

Tren Capaian Skor GEI Indonesia, 1996-2019



Capaian Ranking dan Skor GEI Negara Asia Tenggara, 2019

Negara	Rank	Skor
Singapura	1	100
Brunei	27	87,0
Malaysia	38	79,3
Thailand	62	65,8
Indonesia	73	60,1
Filipina	84	54,8
Vietnam	86	53,8
Kamboja	130	31,7
Laos	153	20,6
Myanmar	171	11,5

Sumber: Worldwide Governance Indicators, 2019

Di antara negara-negara Asia Tenggara, Indonesia berada pada 'papan tengah' capaian GEI

Isu Strategis Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola



Manajemen ASN

1. *Database* ASN yang belum solid;
2. Asesmen keahlian dan jabatan kritikal belum dilakukan;
3. Spesialisasi ASN belum optimal didorong;
4. Belum meratanya penyebaran ASN sesuai sektor prioritas dan potensi kewilayahan.



Tata Kelola Kelembagaan

1. Tumpang tindih tugas dan fungsi K/L/LNS;
2. Implementasi SPBE belum terintegrasi.



Pelayanan Publik

1. Tingginya tingkat pengaduan masyarakat;
2. Belum optimalnya pelayanan terpadu dari sisi pendelegasian kewenangan, integrasi proses bisnis, dan data layanan;
3. Belum terintegrasinya layanan publik daring antarjenis layanan.



Akuntabilitas Kinerja

1. Belum optimalnya sistem pengendalian internal pemerintah;
2. Belum berjalannya manajemen kinerja kelembagaan;
3. Belum terlembaganya sistem integritas.

Arah Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan dalam Visi Indonesia 2045



Ciri Birokrasi 2045



**Struktur
Kelembagaan yang
Adaptif, Efektif, dan
Kolaboratif**



**Tata Kelola yang
Terbuka,
Partisipatif, dan
Berbasis TIK**



**SDM ASN yang
Profesional dan
Berintegritas**

Penguatan reformasi birokrasi dan kelembagaan diarahkan melalui ***pengarusutamaan reformasi birokrasi*** di seluruh sektor dan bidang untuk mendukung Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur.

Arah Kebijakan dan Strategi

Bidang Aparatur Negara dalam RPJMN 2020-2024

Program Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola



Arah Kebijakan

PENGUATAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN

PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PROSES BISNIS

REFORMASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Strategi

- Manajemen Talenta Nasional ASN;
- Peningkatan sistem merit ASN;
- Penyederhanaan eselonisasi, dan
- Penataan jabatan fungsional.

- Penataan kelembagaan instansi pemerintah; dan
- Penetapan SPBE terintegrasi.

- Perluasan implementasi sistem integritas,
- Penguatan pengelolaan RB dan akuntabilitas kinerja organisasi, dan
- Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

- *E-services*;
- Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik;
- Penguatan ekosistem inovasi, dan
- Penguatan pelayanan terpadu.

Rincian KP Penguatan Implementasi Manajemen ASN dalam RKP 2021

ProP Manajemen Talenta Nasional

KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)/PROYEK	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA
KP : Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Terwujudnya Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Persentase Kementerian dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas (persen)	100	Pusat dan Daerah	
		Persentase LPNK dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas (persen)	80		
		Persentase Provinsi dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas (persen)	49		
		Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas (persen)	15		
ProP : Manajemen Talenta Nasional ASN	Terbangunnya Manajemen Talenta Nasional ASN	Jumlah instansi yang menerapkan manajemen talenta ASN (K/L/Provinsi/Kab/Kota)	Tahun 2021 tidak dilakukan penghitungan		
Kebijakan Ragam Okupasi Kritis ASN Nasional	Tersusunnya Kebijakan Ragam Okupasi Kritis ASN Nasional	Jumlah kebijakan Ragam Okupasi Kritis ASN Nasional (Kebijakan)	1	Pusat	Kemen PAN dan RB
Instansi pemerintah yang menerapkan pola karir nasional	Terlaksananya Penerapan Pola Karir Nasional di Instansi Pemerintah	Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan pola karir nasional (Instansi Pemerintah)	10	Pusat	Kemen PAN dan RB
Penyusunan Gap analysis kebutuhan SDM ASN sesuai sektor prioritas dan potensi kewilayahan	Tersusunnya gap analysis kebutuhan SDM ASN sesuai sektor prioritas dan potensi kewilayahan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan gap analysis yang disusun (Rekomendasi Kebijakan)	1	Pusat	LAN
Penerapan sekolah kader ASN	Terlaksananya penerapan sekolah kader ASN	Jumlah peserta yang mengikuti sekolah kader (peserta)	30	Pusat	LAN
Penyusunan Data ASN yang Akurat dan Komprehensif	Tersusunnya Data ASN yang Akurat dan Komprehensif	Jumlah Data ASN (database)	1	Pusat	BKN
Analisis penyusunan kebutuhan ASN nasional berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja	Tersusunnya Analisis penyusunan kebutuhan ASN nasional berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja	Jumlah hasil analisis dan standar kebutuhan ASN (paket)	1	Pusat	BKN
Pemetaan kompetensi ASN (JPT, JA dan Jafung) melalui Assesment Center	Terpetakannya kompetensi ASN (JPT, JA dan Jafung) melalui Assesment Center	Jumlah ASN (JPT, JA dan Jafung) yang terpetakan kompetensinya (orang)	2.000	Pusat	BKN

Rincian KP Penguatan Implementasi Manajemen ASN dalam RKP 2021

ProP Peningkatan Penerapan Sistem Merit ASN ...(1/2)

KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)/PROYEK	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Peningkatan Penerapan Sistem Merit ASN	Terlaksananya Peningkatan Penerapan Sistem Merit ASN	Jumlah Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas (IP)	108	Pusat dan Daerah	
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN	Tersusunnya Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN (rekomendasi)	100	Pusat dan Daerah	Kemen PAN dan RB (KASN)
Monitoring Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku	Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku	Jumlah IP yang patuh dalam pelaksanaan nilai dasar, kode etik, kode perilaku (Instansi Pemerintah)	150	Pusat dan Daerah	Kemen PAN dan RB (KASN)
Penilaian Penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah	Terlaksananya Penilaian Penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah	Jumlah IP yang dilakukan Penilaian Penerapan Sistem Merit (Instansi Pemerintah)	200	Pusat dan Daerah	Kemen PAN dan RB (KASN)
Pembinaan Penerapan Sistem Merit	Terlaksananya Pembinaan Penerapan Sistem Merit	Jumlah IP yang dilakukan pembinaan penerapan sistem merit (Instansi Pemerintah)	70	Pusat dan Daerah	Kemen PAN dan RB (KASN)
Pengawasan Pelaksanaan Seleksi JPT di Instansi Pemerintah	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Seleksi JPT di Instansi Pemerintah	Jumlah Rekomendasi Hasil pengawasan pelaksanaan seleksi JPT di Instansi Pemerintah (rekomendasi)	1.750	Pusat dan Daerah	Kemen PAN dan RB (KASN)
Kebijakan Gaji, Tunjangan dan Fasilitas (GTF)	Tersusunnya Kebijakan Gaji, Tunjangan dan Fasilitas (GTF)	Jumlah kebijakan (kebijakan)	1	Pusat	Kemen PAN dan RB
Kebijakan Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS (JP-JHT)	Tersusunnya kebijakan Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS	Jumlah kebijakan (kebijakan)	1	Pusat	Kemen PAN dan RB
Kebijakan ketentuan sanksi bagi pejabat pembina kepegawaian atas pelanggaran prinsip sistem merit dalam manajemen ASN	Tersusunnya kebijakan ketentuan sanksi bagi pejabat pembina kepegawaian atas pelanggaran prinsip sistem merit dalam manajemen ASN	Jumlah kebijakan ketentuan sanksi bagi pejabat pembina kepegawaian atas pelanggaran prinsip sistem merit dalam manajemen ASN (Perpres)	1	Pusat	Kemen PAN dan RB
Pengembangan Kebijakan Pedoman Sistem Diklat Kepemimpinan ASN Mendukung Smart Governance	Terlaksananya Pengembangan Kebijakan Pedoman Sistem Diklat Kepemimpinan ASN Mendukung Smart Governance	Jumlah peraturan dan modul sistem diklat kepemimpinan yang dihasilkan (peraturan dan modul)	1 Peraturan dan 1 modul	Pusat	LAN
Pengembangan Kebijakan Model Pelatihan Teknis Substantif Jabatan Fungsional ASN Mendukung Smart Governance	Terlaksananya Pengembangan Kebijakan Model Pelatihan Teknis Substantif Jabatan Fungsional ASN Mendukung Smart Governance	Jumlah peraturan dan modul model pelatihan teknis substantif (peraturan dan modul)	1 Peraturan dan 1 modul	Pusat	LAN

Rincian KP Penguatan Implementasi Manajemen ASN dalam RKP 2021

ProP Peningkatan Penerapan Sistem Merit ASN ...(2/2)

KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)/PROYEK	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Peningkatan Penerapan Sistem Merit ASN	Terlaksananya Peningkatan Penerapan Sistem Merit ASN	Jumlah Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas (IP)	108	Pusat dan Daerah	
Evaluasi dan pengembangan sistem rekrutmen CASN	Terlaksananya Evaluasi dan pengembangan sistem rekrutmen CASN	Jumlah sistem rekrutmen yang dikembangkan (sistem)	1	Pusat	BKN
Pengembangan kapasitas pengelolaan jabatan fungsional kepegawaian berbasis sistem merit	Terlaksananya pengembangan kapasitas pengelolaan jabatan fungsional kepegawaian berbasis sistem merit	Jumlah instansi pemerintah yang ditransfer pengembangan knowledge, skill, attitude (KSA), dan menerapkan pengelolaan jabatan fungsional kepegawaian (Instansi Pemerintah (IP))	625	Pusat	BKN
Pembangunan Sistem Informasi ASN Terintegrasi	Terbangunnya Sistem Informasi ASN Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi ASN Terintegrasi (Paket Sistem)	1 (7 aplikasi)	Pusat	BKN
Penerapan Pola Karir Instansi Pemerintah	Terlaksananya Penerapan Pola Karir Instansi Pemerintah	Jumlah Instansi Pemerintah yang menerapkan pola karir instansi (Instansi Pemerintah (IP))	137	Pusat	BKN
Penerapan Sistem informasi Manajemen Kinerja ASN	Terlaksananya Penerapan Sistem informasi Manajemen Kinerja ASN	Jumlah IP yang menerapkan manajemen kinerja ASN sesuai PP 30/2019 menggunakan sistem informasi kinerja (Instansi Pemerintah (IP))	204	Pusat	BKN
Pelatihan Teknis dan Sertifikasi Pengelola Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit	Terlaksananya Pelatihan Teknis dan Sertifikasi Pengelola Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit	Jumlah pengelola kepegawaian yang tersertifikasi (orang)	1.500	Pusat	BKN
Pelatihan Teknis dan Sertifikasi Pengelola Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Khusus Wilayah Papua dan Papua Barat	Terlaksananya Pelatihan Teknis dan Sertifikasi Pengelola Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Khusus Wilayah Papua dan Papua Barat	Jumlah pengelola kepegawaian di instansi pemerintah daerah Papua dan Papua Barat yang tersertifikasi (orang)	250	Pusat	BKN
Fasilitasi Evaluasi Jabatan ASN pada Pemerintah Daerah di Wilayah Papua dan Papua Barat	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Jabatan ASN pada Pemerintah Daerah di Wilayah Papua dan Papua Barat	Jumlah instansi pemerintah daerah di wilayah Papua dan Papua Barat melaksanakan evaluasi jabatan ASN (Pemda)	30	Pusat	BKN

Indikasi Isu Strategis terkait Manajemen ASN Tahun 2022

Manajemen
Talenta ASN

Penerapan
Sistem Merit

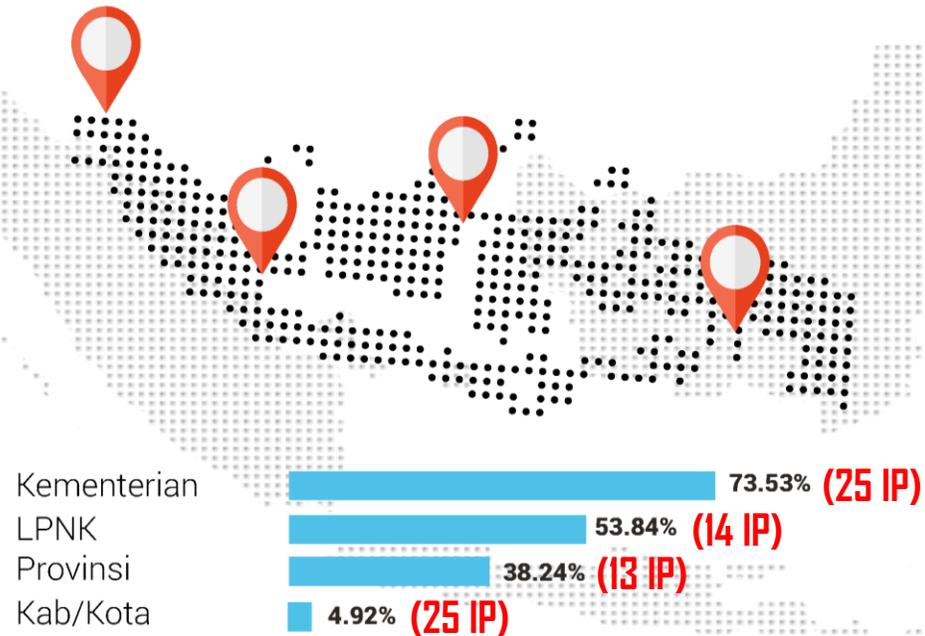
Penyederhanaan
Birokrasi

Dukungan untuk *Major
Project* Reformasi
Kesehatan Nasional

*(Reformasi pendidikan dan
penempatan tenaga kesehatan)*

Analisis Penilaian Sistem Merit Tahun 2020

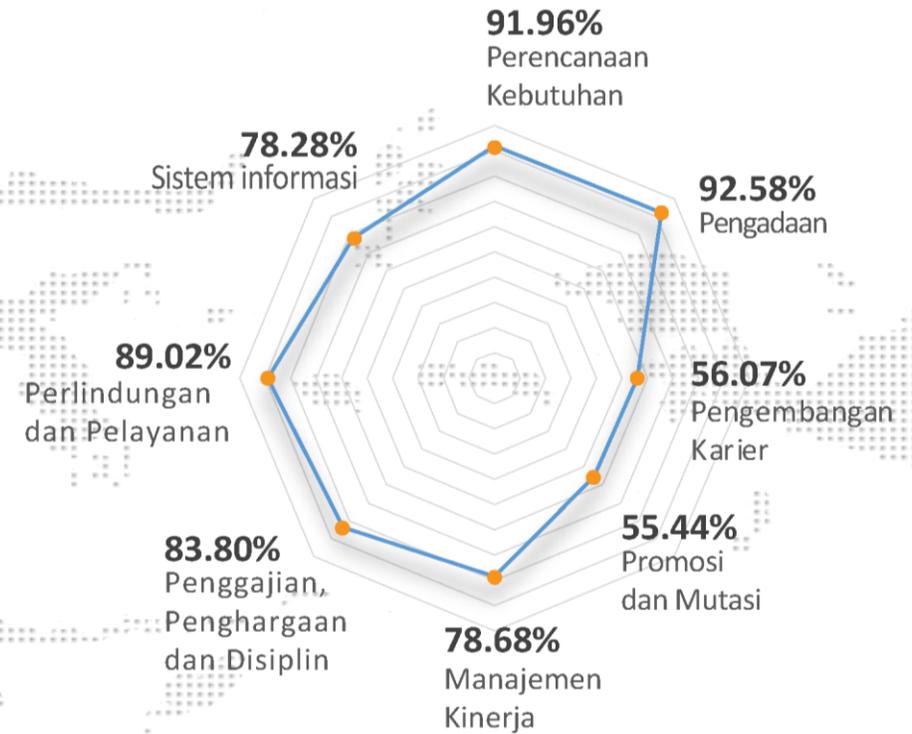
Instansi Pemerintah dengan Indeks \geq Baik



Perhitungan didasarkan pada jumlah 34 Kementerian, 26 LPNK, 34 Provinsi, 508 Kabupaten/Kota

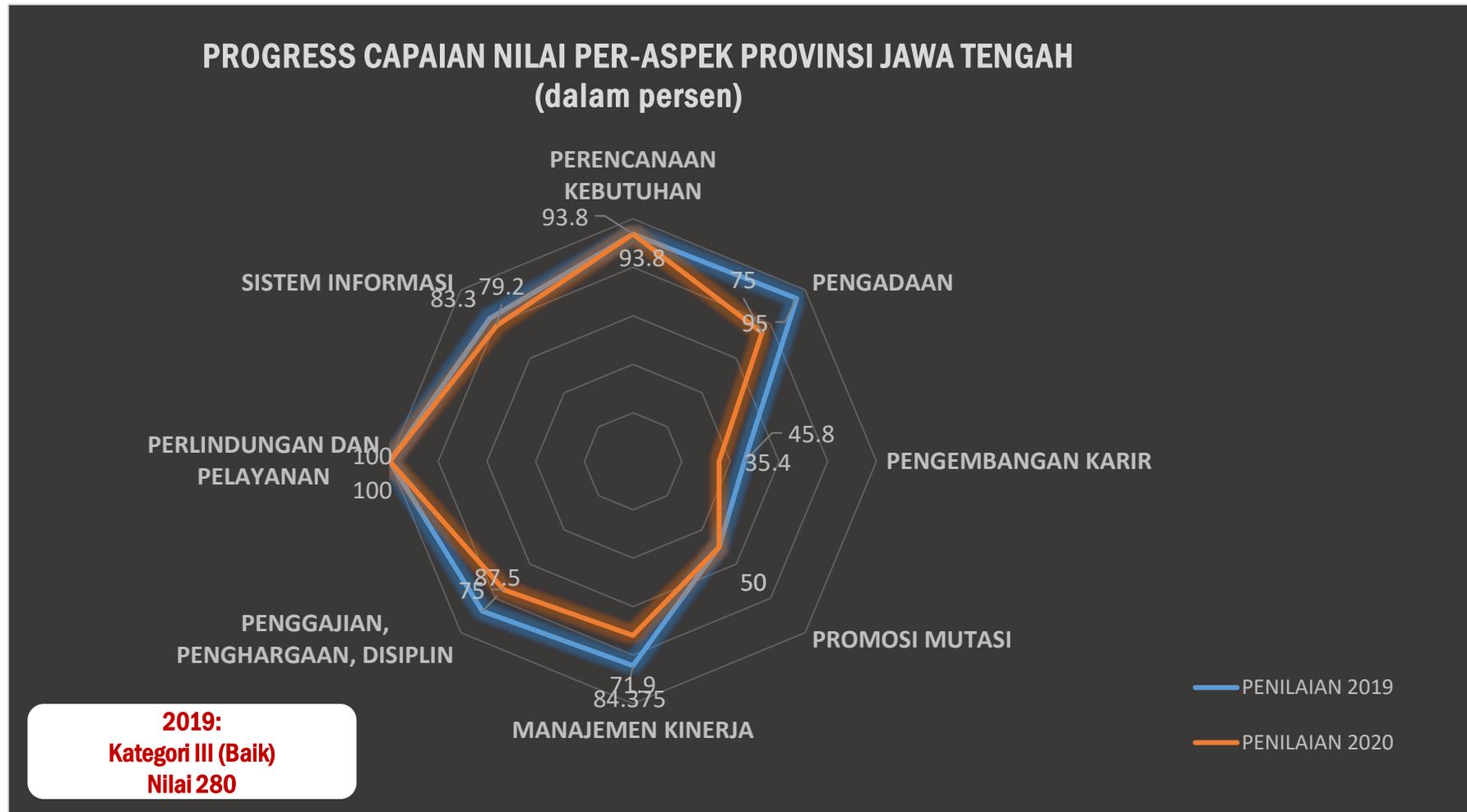
Sumber: KASN, 2021

Analisis Aspek Penerapan Sistem Merit



- Pada tahun 2020, terdapat 81 Instansi Pemerintah yang telah mendapatkan penerapan sistem merit kategori baik ke atas, dengan rincian: 25 Kementerian, 14 LPNK, 4 Lembaga lainnya, 13 Provinsi dan 25 Kab/Kota.
- Hasil penilaian penerapan sistem merit menunjukkan pada **aspek Pengadaan dan Perencanaan kebutuhan** rata – rata IP telah menerapkan sistem merit dengan baik, namun pada aspek **pengembangan karier, promosi dan mutasi** rata – rata IP belum melaksanakannya dengan baik.

Perkembangan Penerapan Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah – 2020



RINCIAN NILAI AKHIR

ASPEK	SKOR IDEAL	SKOR
(1)	40	37.5
(2)	40	38
(3)	130	55
(4)	40	20
(5)	80	67.5
(6)	40	35
(7)	16	16
(8)	24	20
Total	410	289

KATEGORI "BAIK"

Beberapa Hasil Penilaian Sistem Merit Tahun 2020 untuk Tingkat Provinsi (10 besar)

No.	Nama Instansi	Nilai	Katagori
1.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	375,5	Sangat Baik
2.	Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	342,0	Sangat Baik
3.	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	332,0	Sangat Baik
4.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	310,5	Baik
5.	Pemerintah Provinsi Riau	293,5	Baik
6.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	290,0	Baik
7.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	289,0	Baik
8.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	281,0	Baik
9.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	274,5	Baik
10.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	270,0	Baik

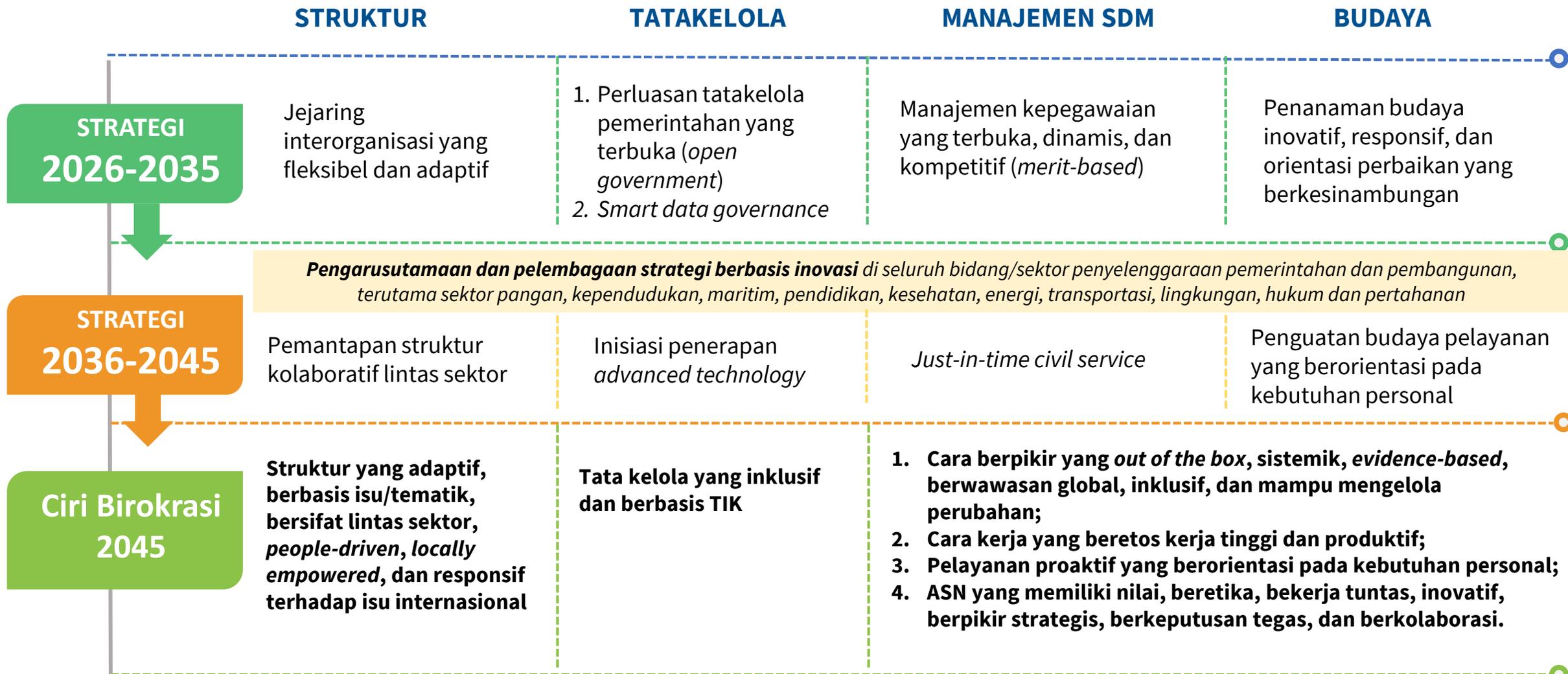
Beberapa Hasil Penilaian Sistem Merit Tahun 2020 untuk Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Nama Instansi	Nilai	Katagori
1.	Pemerintah Kota Bandung	332,5	Sangat Baik
2.	Pemerintah Kota Tangerang	326,0	Sangat Baik
3.	Pemerintah Kota Pekanbaru	314,5	Baik
4.	Pemerintah Kabupaten Sumedang	301,5	Baik
21.	Pemerintah Kota Surakarta	253,5	Baik
43.	Pemerintah Kabupaten Sragen	187,0	Kurang
55.	Pemerintah Kabupaten Demak	160,5	Buruk
56.	Pemerintah Kabupaten Klaten	160,5	Buruk
86.	Pemerintah Kabupaten Kebumen	144,5	Buruk
87.	Pemerintah Kabupaten Wonosobo	107,5	Buruk

Sumber: KASN, 2021

Catatan : KASN belum dapat melakukan asesmen untuk melakukan penilaian diseluruh kabupaten/kota pada tahun 2020 karena keterbatasan anggaran dan sumberdaya manusia

Trajektori Pembangunan Aparatur Negara Pasca-2024



Beberapa Catatan

1. Untuk mendukung dan menjaga target pembangunan nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat menjadikan **indikator Sistem Merit** sebagai indikator pembangunan yang dituangkan dalam dokumen *RPJMD*, *RKPD* dan *Renstrada* tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota;
2. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan manajemen ASN berbasis Sistem Merit (sesuai UU No. 5/2014 tentang ASN), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah c.q BKD Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat melakukan pembinaan kepada OPD di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten/Kota;
3. Sistem Merit ini juga menjadi salah satu komponen dalam *indeks komposit Reformasi Birokrasi* yang pelaksanaannya dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4. Perlu meningkatkan peran BKD tingkat provinsi kepada BKD di tingkat kabupaten/kota dalam asistensi dan pembinaan kepegawaian.
5. Bersama BKD provinsi menerapkan indikator Sistem Merit di dokumen RPJMD dan Renstra, terutama untuk 21 kabupaten/kota yang baru melakukan pilkada serentak dan saat ini sedang menyusun dokumen tersebut.

Terima Kasih

Lampiran



HASIL EVALUASI SISTEM MERIT DAN REKOMENDASI PROVINSI JAWA TENGAH

Aspek	Nilai Ideal	Nilai Total	Catatan Evaluasi	Saran Perbaikan
Perencanaan Kebutuhan	40	37.5	<ol style="list-style-type: none">1. Sudah menyusun peta jabatan namun belum ditetapkan oleh PPK2. Sudah membangun SIMPEG dan memiliki data pegawai yang akan pensiun dalam 5 tahun3. Rencana pemenuhan pegawai sudah disesuaikan dengan Anjab, ABK, serta Renstra Organisasi	<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan Peta Jabatan yang telah disusun
Pengadaan	40	38	<ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan ASN disusun berdasarkan zero growth2. Sudah memiliki kebijakan pengadaan ASN3. Sudah melaksanakan penerimaan pegawai secara terbuka, kompetitif dan transparan;4. Belum mengintegrasikan latsar dengan program pengembangan kompetensi serta belum melaksanakan evaluasi pasca latsar pada CPNS5. CPNS yang diangkat menjadi PNS sudah sesuai dengan jabatan yang dilamar.	<ol style="list-style-type: none">1. Mengintegrasikan latsar dengan program pengembangan kompetensi teknis lain serta melakukan evaluasi pasca Latsar kepada para CPNS sesuai dengan Peraturan LAN Nomor 12 Tahun 2018



HASIL EVALUASI SISTEM MERIT DAN REKOMENDASI PROVINSI JAWA TENGAH

Aspek	Nilai Ideal	Nilai Total	Catatan Evaluasi	Saran Perbaikan
Pengembangan Karir	130	55	<ol style="list-style-type: none">1. Sudah menyusun draft SKJ untuk JPT dan JA2. Sudah melakukan pemetaan kompetensi untuk JPT dan JA3. Belum membangun talent pool dan rencana suksesi4. Sudah tersedia analisis kesenjangan kompetensi untuk JPT dan JA5. Sudah tersedia program dan aplikasi diklat, membangun Corporate University sebagai program pengembangan kompetensi pegawai6. Sudah tersedia analisis kesenjangan kinerja7. Sudah menyusun program diklat namun belum disesuaikan dengan kebutuhan pegawai8. Belum melaksanakan praktik kerja dan pertukaran pegawai, namun telah menyusun programnya9. Belum melaksanakan coaching dan mentoring	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan menetapkan SKJ untuk seluruh jabatan2. Memetakan profil kompetensi untuk seluruh pegawai3. Membangun talent pool dan rencana suksesi4. Menyusun strategi untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja pegawai disesuaikan dengan kebutuhan pegawai5. Melaksanakan praktik kerja/ pertukaran pegawai, coaching dan mentoring



HASIL EVALUASI SISTEM MERIT DAN REKOMENDASI PROVINSI JAWA TENGAH

Aspek	Nilai Ideal	Nilai Total	Catatan Evaluasi	Saran Perbaikan
Promosi dan Mutasi	40	20	<ol style="list-style-type: none">1. Belum menyusun pola karir instansi2. Sudah menetapkan kebijakan tentang pengisian JPT, namun belum menyusun kebijakan terkait Promosi dan Mutasi3. Sudah melaksanakan pengisian JPT secara terbuka dan promosi pegawai berdasarkan pada hasil assessment	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan menetapkan pola karir instansi, kebijakan pengisian JPT serta promosi dan mutasi
Manajemen Kinerja	80	67.5	<ol style="list-style-type: none">1. Sudah menyusun kontrak kinerja untuk seluruh pegawai yang sesuai dengan Renstra Organisasi (casecade)2. Telah melaksanakan penilaian kinerja pegawai secara terukur dan telah dilaksanakan secara berkala untuk seluruh pegawai3. Belum melakukan analisis kesenjangan kinerja serta belum menyusun strategi untuk mengatasi kesenjangan tersebut4. Hasil penilaian kinerja belum telah dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam pembinaan dan pengembangan karir pegawai	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan analisis kesenjangan kinerja dan menyusun strategi untuk mengatasinya serta menjadikan penilaian kinerja sebagai pertimbangan utama dalam pembinaan dan pengembangan karir pegawai



HASIL EVALUASI SISTEM MERIT DAN REKOMENDASI PROVINSI JAWA TENGAH

Aspek	Nilai Ideal	Nilai Total	Catatan Evaluasi	Saran Perbaikan
Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	40	35	<ol style="list-style-type: none">1. Kinerja telah menjadi faktor utama dalam pemberian tunjangan kerja2. Telah menyusun dan melaksanakan kebijakan penghargaan kepada pegawai berprestasi namun belum dilaksanakan secara konsisten3. Telah menyusun peraturan kode etik dan kode perilaku dan telah disosialisasikan4. Data pegawai yang dijatuhi hukuman telah dikelola namun belum terintegrasikan dengan SAPK BKN	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan kebijakan penghargaan kepada pegawai berprestasi secara konsisten2. Menegakkan peraturan mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku secara konsisten3. Mengintegrasikan data pengelolaan PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dengan SAPK BKN
Perlindungan dan Pelayanan	16	16	<ol style="list-style-type: none">1. Sudah memiliki kebijakan perlindungan pegawai2. Sudah tersedia fasilitas pelayanan administrasi pegawai	-
Sistem Informasi	32	20	<ol style="list-style-type: none">1. Sudah membangun SIMPEG yang menyajikan data realtime2. Sudah menggunakan e-performance3. Sudah membangun sistem informasi untuk pelayanan administrasi kepegawain4. Telah membangun assessment centre	<ol style="list-style-type: none">1. Mengintegrasikan SIMPEG dengan SINITA (e-kinerja), serta aplikasi pembinaan karir ASN